

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota” ini ditulis oleh Moch. Nico Kurniawan NIM. 126103203252, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, dibimbing oleh Yusron Munawir, S.H., M.H.

Kata Kunci : Putusan, Batas Usia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang memutuskan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Adapun bunyi putusan tersebut yaitu “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon”, putusan tersebut bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada pemilihan kepala daerah tahun 2024; 2) Bagaimana problem yuridis peraturan Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota; 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Wali Kota.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga juga biasa disebut penelitian hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan batas usia pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang. Dilihat dari pengaturan batas usia terutama dalam Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batas usia

calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menyebutkan bahwa : "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih". 2) Problem Yuridis yang terdapat dalam Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 jika disandingkan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dapat dikatakan bertentangan karena putusan tersebut melanggar Undang-Undang di atasnya, terdapat beberapa problem yuridis diantaranya: a, Putusan MA No 23 P/HUM/2024 bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; b, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 menimbulkan Ketidakpastian Hukum; c, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/ 2024 bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. Selain itu, asas (*lex superior derogate lex inferiori* atau undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah, asas (*lex specialis derogate lex generalis*) atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum serta asas (*lex posteriori derogate lex priori*) atau undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu perlu diperhatikan dalam peraturan ini.; 3) Menurut imam al Mawardi imamah (kepemimpinan) itu wajib menurut syariat agama dan wajibnya imamah adalah fardhu kifayah. Batas usia dalam Tafsir Surat Al-Ahqaf ayat 15 tersebut dijelaskan bahwasannya, pada usia 40 tahun akal seseorang sudah matang dan memiliki pengertian serta kesabaran yang sempurna. Seseorang mempunyai kekuatan, logika dan wawasan yang sempurna mulai dari usia 33 atau 30 tahun. Akan tetapi, pada usia 40 tahunlah usia sempurna dipuncak kedewasaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dianggap mempunyai kematangan berfikir sempurna adalah usia 40 tahun dalam pandangan Islam. Sedangkan menurut putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota adalah 25 tahun, batas usia tersebut dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

ABSTRACT

Thesis with the title "Judicial Review of Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 concerning Age Limits for Candidates for Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, Mayor and Deputy Mayor" was written by Moch. Nico Kurniawan NIM. 126103203252, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung 2024, supervised by Yusron Munawir, S.H., M.H.

Keywords: Decision, Age Limit

This research was motivated by Supreme Court decision Number 23 P/HUM/2024 which decided the age limits for candidates for governor and deputy governor, regent and deputy regent, mayor and deputy mayor. The decision states that "the minimum age is 30 (thirty) years for candidates for governor and deputy governor and 25 (twenty five) years for candidates for regent and deputy regent or candidates for mayor and deputy mayor as of the inauguration of the candidate pairs," the decision This is contrary to the above regulations, namely Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors.

The problem formulation used in this research is as follows: 1) How are the age limits set for candidates for governor and deputy governor, regent and deputy regent, mayor and deputy mayor in the 2024 regional head elections; 2) What are the juridical problems of regulation number 23 P/HUM/2024 concerning Age Limits for Candidates for Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, Mayor and Deputy Mayor; 3) What is the review of *siyasah dusturiyah fiqh* regarding No. 23 P/HUM/2024 concerning Age Limits for Candidates for Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, Mayor and Deputy Mayor.

This research method uses a type of normative juridical research or legal research which only examines library materials so it is also usually called library legal research. The data collection technique uses secondary data, namely data obtained from books, research journals, and statutory regulations that are closely

related to the problem being studied. The data analysis technique uses qualitative descriptive analysis. Meanwhile, to check the validity of the data, researchers used a credibility test.

The results of the research show that: 1) Setting the age limit for candidacy for governor and deputy governor, regent and deputy regent or mayor and deputy mayor is regulated by Law Number 10 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Determination of Replacement Government Regulations Law Number 1 of 2014 concerning the election of governors, regents and mayors has become law. Judging from the age limit regulations, especially in Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 concerning the age limits for candidates for governor and deputy governor, regent and deputy regent as well as mayor and deputy mayor. Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 states that: "A minimum age of 30 (thirty) years for candidates for governor and deputy governor and 25 (twenty five) years for candidates for regent and deputy regent or candidates for mayor and deputy mayor as of inauguration of the selected candidate pairs". 2) The juridical problems contained in the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 when compared with the laws and regulations above can be said to be contradictory because the decision violates the Law above. There are several juridical problems including: a, Supreme Court Decision No. 23 P/ HUM/2024 is contrary to Law Number 10 of 2016; b, Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 creates legal uncertainty; c, Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 is contrary to the principles of order and legal certainty. Apart from that, principles (*lex superior derogate lex inferiori*) or higher laws override lower laws, principles (*lex specialis*

derogate *lex generalis*) or specific laws override general laws and principles (*lex posteriori* derogate *lex priori*) or a recently enacted law canceling a previous law needs to be taken into account in this regulation; 3) According to Imam al Mawardi, *imamah* (leadership) is obligatory according to religious law and the obligation of *imamah* is *fardhu kifayah*. The age limit in the Tafsir of Surah Al-Ahqaf verse 15 explains that at the age of 40 a person's mind is mature and has perfect understanding and patience. A person has perfect strength, logic and insight starting from the age of 33 or 30 years. However, at the age of 40 is the perfect age at the peak of maturity. Thus, it can be concluded that someone who is considered to have perfect thinking maturity is 40 years old in the Islamic view. Meanwhile, according to Supreme Court decision Number 23 P/HUM/2024, the minimum age limit for candidates for governor and deputy governor is 30 years and for candidates for regent and deputy regent and mayor and deputy mayor is 25 years, the age limit is calculated from the inauguration of the elected candidate pair.

ملخص

ماجستير بعنوان "مراجعة قضائية لقرار المحكمة العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨" ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣ بشأن الحدود العمرية للمرشحين لمنصب الحاكم ونائب الحاكم، الوصي ونائب الوصي، العمدة ونائب العمدة" كتبه موتش. نيكو كورنيوان نيم. ١٢٦١٠٣٢٠٣٢٥٢، برنامج دراسة القانون الدستوري، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أجونج ٢٠٢٤، تحت إشراف يسرون مناور الماجستير..

الرئيسية: القرار، الحد العمري

كان الدافع وراء هذا البحث هو قرار المحكمة العليا رقم ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣ الذي قرر الحدود العمرية للمرشحين لمنصب الحاكم ونائب المحافظ، والوصي ونائب الوصي، ورئيس البلدية ونائب رئيس البلدية. وينص القرار على أن "الحد الأدنى للسنة هو ٣٠ (ثلاثين) عامًا للمرشحين لمنصب الحاكم ونائب الحاكم و ٢٥ (خمس وعشرون) عامًا للمرشحين لمنصب الوصي ونائب الوصي أو المرشحين لمنصب رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية اعتبارًا من تنصيب أزواج المرشحين" ويتعارض القرار مع الأنظمة المذكورة أعلاه، وهي القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن انتخاب المحافظين والأوصياء ورؤساء البلديات".

صياغة المشكلة المستخدمة في هذا البحث هي كما يلي: (١) كيف يتم تحديد الحدود العمرية للمرشحين لمنصب الحاكم ونائب المحافظ، والوصي ونائب الوصي، ورئيس البلدية ونائب رئيس البلدية في انتخابات رؤساء المناطق لعام ٢٠٢٤؛ (٢) ما هي المشاكل القانونية للائحة رقم ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣ بشأن الحدود العمرية للمرشحين لمنصب الحاكم ونائب المحافظ، والوصي ونائب الوصي، والعمدة ونائب العمدة؛ (٣) ما مراجعة فقه السياسة الدستورية في رقم: ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣ بشأن الحدود العمرية للمرشحين لمنصب الحاكم ونائب المحافظ والوصي ونائب الوصي والعمدة ونائب العمدة.

تستخدم طريقة البحث هذه نوعًا من البحث القانوني المعياري أو البحث القانوني الذي يفحص فقط مواد المكتبة لذلك يُطلق عليه أيضًا عادةً البحث القانوني المكتبي. تستخدم تقنية جمع البيانات بيانات ثانوية، وهي البيانات التي يتم الحصول عليها من الكتب والمجلات البحثية واللوائح القانونية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشكلة قيد الدراسة. تستخدم تقنية تحليل البيانات التحليل الوصفي النوعي. وأثناء التحقق من صحة البيانات، استخدم الباحثون اختبار المصادقية وتشير نتائج البحث إلى أن: (١) تحديد سن الترشح لمنصب المحافظ ونائب المحافظ

والوصي ونائب الوصي أو العمدة ونائب العمدة ينظمه القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٦ في شأن التعديل الثاني للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥ في شأن قانون إنشاء اللوائح الحكومية البديلة رقم ١

لسنة ٢٠١٤ في شأن انتخاب المحافظين والأوصياء ورؤساء البلديات انطلاقاً من لوائح الحد العمري، لا سيما في قرار المحكمة العليا رقم ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣ بشأن الحدود العمرية للمرشحين لمنصب الحاكم ونائب المحافظ، والوصي ونائب الوصي، وكذلك رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية. ينص قرار المحكمة العليا رقم ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣ على ما يلي: "الحد الأدنى لسن ٣٠ (ثلاثين) عاماً للمرشحين لمنصب الحاكم ونائب الحاكم و٢٥ (خمس وعشرون) عاماً للمرشحين لمنصب الوصي ونائب الوصي أو المرشحين لمنصب رئيس البلدية ونائبه" عمدة اعتباراً من تنصيب أزواج المرشحين المختارين "٢. المشاكل القضائية الواردة في قرار المحكمة العليا رقم ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣، عند مقارنتها بالقوانين واللوائح أعلاه، يمكن القول بأنها متناقضة لأن القرار يخالف القانون أعلاه. هناك العديد من المشاكل القانونية بما في ذلك: (أ) العليا قرار المحكمة رقم ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣ يتعارض مع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٦؛ (ب) قرار المحكمة العليا رقم ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣ يخلق حالة من عدم اليقين القانوني؛ (ج) قرار المحكمة العليا رقم ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣ يتعارض مع مبادئ النظام واليقين القانوني وبصرف النظر عن ذلك، فإن المبادئ (القانون الأعلى ينتقص من القانون الأدنى) أو القوانين الأعلى تلغي القوانين الأدنى، أو المبادئ (القانون الخاص الذي ينتقص من القانون العام) أو قوانين محددة تتجاوز القوانين والمبادئ العامة (القانون اللاحق الذي ينتقص من القانون القبلي) أو قانون تم سنه مؤخراً يلغي قانوناً سابقاً. يجب أن يؤخذ القانون بعين الاعتبار في هذه اللائحة؛ ٣) عند الإمام الماوردي: الإمامة واجبة شرعاً، ووجوب الإمامة هو فرض الكفاية. يوضح الحد العمري في تفسير سورة الأحقاف الآية ١٥ أنه في سن الأربعين يكون عقل الشخص ناضجاً ويتمتع بفهم كامل وصبر. يتمتع الإنسان بكامل القوة والمنطق والبصيرة ابتداءً من سن ٣٣ أو ٣٠ عاماً. ومع ذلك، فإن سن الأربعين هو العمر المثالي لذروة النضج. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن من يعتبر كامل النضج الفكري يبلغ من العمر ٤٠ سنة في النظر الإسلامي. وفي الوقت نفسه، وفقاً لقرار المحكمة العليا رقم ٢٣ ص/ هو م/ ٢٠٢٣، فإن الحد الأدنى لسن المرشحين لمنصب الحاكم ونائب المحافظ هو ٣٠ عاماً وللمرشحين لمنصب الوصي ونائب الوصي وكذلك رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية هو ٢٥ عاماً، والعمر يتم احتساب الحد من تنصيب زوج المرشحين المنتخبين.